

OPINI



Heri Priyatmoko
Dosen Sejarah Fakultas Sastra
Universitas Sanata Dharma

Prancis-Yogya

TRAGEDI Paris belum tuntas dipercakapkan, sebab ada persoalan rasa kamanungsan yang terkoyak di sana. Banyak korban bergelimpangan akibat aksi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Masyarakat dunia menghujatnya, tak terkecuali Indonesia. Bangsa kita menenun hubungan dengan negara Menara Eiffel itu. Yogyakarta, misalnya. Selain ada jurusan Bahasa Prancis di Universitas Gadjah Mada (UGM), terdapat pula lembaga mentereng

bernama Institut Français Indonesia (IFI).

Lembaga ini memanggul misi mengenalkan budaya Prancis dengan konsep keragaman budaya, memberi pelatihan Bahasa Prancis, dan berperan aktif dalam diskusi intelektual. Lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Luar Negeri Prancis dan Kedutaan Besar Prancis di Indonesia itu merupakan pintu guna memahami jagad Prancis. Maka, maklum, bila tak sedikit anak muda tertarik mengikuti program yang diadakan IFI ataupun

Bersambung Ke Hal 11

TribunOpini menerima kiriman artikel opini tentang beragam isu populer lokal, regional, maupun nasional. **TribunOpini** tayang setiap Selasa, Rabu, dan Jumat. Panjang artikel 3.000 karakter atau sekitar 525 kata. Kirim naskah via email : tribunopini@gmail.com, sertakan foto dan identitas diri Anda.

Prancis-Yogya

Sambungan Hal 1

sekadar bermain di kantin sembari mencecap secangkir teh hangat.

Ditarik mundur jauh ke belakang. Prancis pernah menganggangi Indonesia tahun 1808-1811. Louis Napoleon, anak dari saudara Napoleon Bonaparte, menugasi Marsekal Herman Willem Daendels untuk mengurus dan mempertahankan Jawa dari invasi Inggris. Detik itu, Keraton Kasultanan Yogyakarta dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwono II, yang kelak disebut Sultan Sepuh.

Negara Belanda tunduk kepada Kekaisaran Prancis *jalaran* keok di medan perang. Otomatis, Jawa ganti dikuasai Prancis. Kenyataan ini bikin Daendels girang untuk mengujicoba sejumlah gagasan di tanah koloni.

Terkenal begitu kejam,

Daendels pun ditempli julukan Marsekal Besi, Tuan Besar Guntur, atau Mas Galak, oleh masyarakat pribumi. Ia mengontrol relasi antara raja Jawa dengan pihak penjajah. Semula, pengawasan ini dikerjakan oleh gubernur dari pesisir utara Jawa, tetapi kemudian jabatan ini dihapus.

Di sini, Daendels mau memotong ikatan batin antara raja lokal dengan kompeni Belanda yang potensial merongrong kekuasaan Prancis di tingkat Hindia Belanda. Seluruh residen diminta menghadap dan diganti sesuai keinginan Daendels, lantas diberi pangkat menteri. Tak berhenti di situ, Daendels mengeluarkan regulasi: mengubah upacara tradisional keraton. Intervensi yang kelewatan ini menyebabkan pimpinan istana Kasultanan berang.

Daendels mencegah Sultan menyerahkan tampuk kekuasaan kepada putera mahkota. Pertimbangan politisnya ialah, Daendels ingin menata ulang perbatasan antara istana Kasunanan Surakarta dan Yogyakarta, serta wilayah pemerintah Belanda yang dituangkan dalam perjanjian tahun 1743 dan 1746.

Sultan melimpahkan persoalan itu ke tangan Daendels pada 23 Desember 1810 lantaran menyangkut eksistensi kedua kerajaan. Tak berselang lama, digelar kontrak politik oleh kedua belah pihak. Daerah Kedu, Demak, Jepara, Grobogan, Wirosari, dan Selo, ditukar guling dengan kawasan milik *Gubermemen* Belanda di Boyolali dan Galuh. Beban raja Hamengku Buwana bertambah, yaitu diminta memelihara

benteng di Klaten dan jalan yang melintasi Kota Gudeg, kala itu.

Sebetulnya, masih ada setumpuk kisah historis yang menarik antara Prancis dengan Kasultanan Yogyakarta periode kolonial. Masa telah bersalin. Kini, kegiatan kebudayaan yang disalurkan oleh IFI dan wacana keilmuan Prancis yang tumbuh di Indonesia melalui *École française d'Extrême-Orient* (Sekolah Prancis untuk Timur Jauh, disingkat EFEO), memberi kelir apik dalam hubungan sosial yang harmonis. Aktivitas kebudayaan yang pekat dengan rasa kemanusiaan, tentu menguntungkan kedua belah pihak. Bukan tanpa alasan jika kita turut bersedih sekaligus marah atas tindakan terorisme yang merusak ketentraman Paris itu... (*)